

SISTEM PENDIDIKAN DI JERMAN

Ilwan Muslim ¹, Dr.Hilmin, M.Pd ²

Program Magister Pendidikan Agama Islam

Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah (Iaiqi) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

Abstrak (Indonesia)

Berdasarkan sejarah, pendidikan di Jerman berdasarkan dua sumber yaitu gereja dan negara. Dalam Republik Federal Jerman pasca perang, sistem sekolah tiga jalur dan universitas dengan sistem ekonomi adalah bentuk yang digunakan. Struktur dan Jenis pendidikan Pada tahu 1992, Lander Jerman Timur sedang melakukan reformasi mendasar, tidak ada gambaran akurat yang dapat diberikan mengenai struktur menyeluruh yang mencakup seluruh Jerman. Akan tetapi, sistem pemberian ijazah yang ada di Jerman barat juga sama dengan yang ada di Jerman Tahun 1970 sistem pendidikan Jerman sudah meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan, hanya sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan dalam Perang Dunia II. Berbagai keunggulan Jerman di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan Jerman yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia II. Tak aneh bila saat ini Jerman menjadi negara tujuan bagi banyak mahasiswa internasional.

Sejarah Artikel

Submitted: 21 Juni 2024

Accepted: 26 Juni 2024

Published: 27 June 2024

Kata Kunci

Tekhnologi; Pendidikan; Digital; Informasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 1945, pemerintah tertinggi negara Jerman berakhir sebagai akibat hancurnya regim Sosialis Nasional dan menyerahkan Jerman tanpa syarat kepada kekuatan Sekutu, kemudian pada tahun 1949, dua negara rival Jerman muncul, yaitu pada daerah penduduk soviet lahir Republik Demokrasi Jerman (the Germani Democratic Republik, GDR), sebuah negara dengan sistem satu partai-Marxisme-Leninisme, dengan ekonomi terpimpin dan pada daerah pendudukan Amerika, Inggris, dan Perancis muncul negara Republik Federal Jerman, dengan sistem perekonomian liberal dan prualistik. Republik Federal Jerman ditetapkan secara resmi sebagai bentuk negara, dengan ciri utama pemerintahan sendiri.

Secara geografis, Jerman terletak di tengah-tengah benua Eropa dengan luas daerah 356,957 kilometer persegi. Jerman berpenduduk 82 juta lebih, dan kira-kira 8% di antaranya bukan kebangsaan Jerman melainkan warga negara asing yang berdatangan ke Jerman. Ada tantangan tersendiri bagi Jerman terhadap mereka yang pendatang, baik yang telah lama berada di Jerman maupun yang baru, masalahnya adalah mengenai bahasa, hal ini merupakan tantangan bagi sistem pendidikan Jerman.

Kemudian sekarang kita beralih pada pendapatan Jerman, Jerman sebagai negara ekspor tangguh mendapat tantangan berat dalam perdagangan internasional, hal ini jelas membawa dampak pada pendidikan. Hal yang sama juga terjadi pada bidang perdagangan dan bidang jasa di Jerman yang masyarakatnya sedang mengalami perubahan sangat cepat. Disamping itu aliran dana semenjak tahun 1990 ke kantong negara yang dulunya bernama Republik Demokrasi Jerman terus berlangsung untuk membiayai pembangunan kembali, perbaikan infra struktur dan usaha

penanggulangan pengangguran. Hal ini secara langsung membebani anggaran negara besar sekali, dan jelas ini mengancam anggaran pemerintah untuk pendidikan.¹

PEMBAHASAN

Politik dan Tujuan Pendidikan di Jerman

Berdasarkan sejarah, pendidikan di Jerman berdasarkan dua sumber yaitu gereja dan negara. Sudah menjadi tradisi semenjak awal abad pertengahan bahwa gereja selalau terlibat dalam pendidikan, sedangkan *the Lander* (asal mula kekuasaan daerah) selalau pula mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pendidikan. Pengumuman resmi mengenai wajib belajar pada beberapa daerah semenjak akhir abad ke-17 dapat dianggap sebagai penanda resmi bahwa masalah pendidikan adalah tanggung jawab negara. Semenjak itu, pengaruh gereja secara umum mulai berkurang. Maka masalah pendidikan mulai saat itu terletak terutama pada kekuatan politik para guru, orang tua, siswa/mahasiswa sebagai perubahan dalam sistem pendidikan.

Dalam Republik Federal Jerman pasca perang, sistem sekolah tiga jalur dan universitas dengan sistem ekonomi adalah bentuk yang digunakan. Oleh karena Undang-undang Federal, yang bertanggung jawab mengenai pendidikan, semenjak itu pula pembicaraan di tingkat "*Lander*" berlangsung terus tentang tujuan reformasi pendidikan. Pemerintah negara bagian (State) yang Sosial Demokrat cenderung untuk menempatkan pendidikan sebagai hak azasi dengan penekanan pada, usaha pendidikan itu atas inisiatif sendiri, persamaan, dan tindakan pengimbalan, sementara pihak Kristen Demokrat Konservatif menginginkan tujuan dan kegiatan pendidikan itu bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat, seperti menyiapkan lulusan yang berkualitas.²

Politik pendidikan dan formulasi tujuan pendidikan merupakan topik yang hangat dalam kelompok Republik Demokrasi. Pada tahun 1949, lebih dari 2/3 guru-guru yang bertugas dibawah partai Sosialis Nasional diganti dengan guru-guru baru yang telah mendapat pendidikan jangka pendek. Dengan demikian kecocokan dengan peraturan komunis dapat tercapai lebih meyakinkan. Maka berlangsunglah model pendidikan Soviet, seperti prinsip "pengajaran politeknik" (1958-59), dengan tujuan formal pendidikan untuk membentuk pribadi sosialis. Sistem pendidikan berjalan secara ketat, dengan kontrol politik tersentralisasi, serta perencanaan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan doktrin negara.

Dengan hilangnya dasar ideologi yang utama, dan sistem politik pun berubah, reunifikasi Jerman memaksa *Lander* Jerman timur menyesuaikan sistem pendidikannya dengan struktur yang ada di Jerman Barat. Maka dalam konstitusi Negara (baru) serta dalam pembukaan Undang-undang tentang Sekolah khusus dan Universitas ditetapkan tujuan umum pendidikan dengan tekanan pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan.³

pendidikan; Jerman. Struktur dan Jenis pendidikan

Pada tahun 1992, *Lander* Jerman Timur sedang melakukan reformasi mendasar, tidak ada gambaran akurat yang dapat diberikan mengenai struktur menyeluruh yang mencakup seluruh Jerman. Akan tetapi, sistem pemberian ijazah yang ada di Jerman barat juga sama dengan yang ada di Jerman Timur.

¹ Hasbullah. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: (PT Raja Grafindo Persada 1999) hlm. 34.

² H. Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* (Bandung: Lubuk Agung 2001) hlm.

³ Rohman, Arif. *Pendidikan Komparatif; Menuju ke Arah Perbandingan Antar Negara*. (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2010) hlm. 67

Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi

Tergantung pada negara bagian, wajib sekolah di Jerman berlaku sembilan atau sepuluh tahun, dengan normal anak masuk sekolah pada usia enam tahun. Jika seorang siswa gagal mendapatkan sertifikat tamat belajar, ia tidak lagi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan formal, dan hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang bersangkutan.

Pendidikan dasar biasanya berlangsung empat tahun, tetapi ibu kota negara, Berlin, melaksanakan sistem enam tahun, beberapa negara bagian lainnya melaksanakan pengajaran tambahan dua tahun pada Grade 5 dan 6 dalam suatu lembaga perantara yang memberikan berbagai jenis pelajaran sebagai persiapan masuk ke program-program sekolah menengah. Hari sekolah dihitung 190 hari setahun pada tingkat pendidikan dasar, dan anak-anak belajar mulai pukul 8:00 pagi sampai pukul tergantung pada tingkat kelas atau “*Grade*”.

Dari kelompok umur yang sama, 28,8% memasuki program atau sekolah yang lebih tinggi yang di kenal dengan *Realschule*, kadang-kadang di sebut juga *Mittelschule* (sekolah menengah). Biasanya, *Realschule* mempersiapkan siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah.

Di Jerman Barat ada upaya semasa fase reformasi tahun 1970-an untuk menggabungkan *Fachhochschulen* dan universitas kedalam suatu institusi, sementara beberapa buah lembaga bentuk gabungan ini berjalan, model seperti ini tidak banyak mendapat simpati dan dukungan untuk dilaksanakan dalam skala besar. Tetapi, satu pengecualian ialah penggabungan fakultas pendidikan guru ke dalam universitas yang sudah ada, atau peningkatan fakultas pendidikan guru menjadi universitas.

Pendidikan Prasekolah

Pada abad ke-18 dan 19, muncul lembaga-lembaga untuk mengurus kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan bantuan yang pada awalnya menyediakan pengajaran keagamaan (Injil). Pendidikan ini diarahkan pada pengendalian dampak-dampak negatif yang bermacam-macam akibat industrialisasi. Pendidikan prasekolah ini melayani anak-anak dari usia 3 tahun, dan guru-gurunya disiapkan melalui pendidikan kejuruan khusus, pendidikan prasekolah lazimnya tidak punya kurikulum untuk belajar membaca dan menulis atau berhitung.

Pendidikan Khusus

Pada tahun 1989, baik di Jerman Timur maupun Jerman Barat, kira-kira 4% siswa tercatat pada lembaga-lembaga yang khusus melayani anak-anak cacat. Di samping itu, Jerman Timur menjalankan sistem sekolah khusus (*Spezialschulen*) bagi anak-anak yang punya bakat istimewa dalam bidang seni atau olah raga yang jumlahnya kira-kira 1% dari kelompok umur.

Biasanya anak-anak cacat diklasifikasikan berdasarkan cacat alami yang menimpanya, seperti buta, cacat fisik, gangguan mental dan sebagainya. Pengadaan kelas-kelas khusus, bahkan kadang-kadang sekolah khusus, mengikuti klasifikasi ini. Ada dua kategori yang termasuk program pendidikan khusus, yaitu yang disebut “kelainan tingkah laku” dan “kesulitan belajar” pada pendidikan khusus.⁴

Pendidikan Vokasional, Teknik, dan Bisnis

Sistem penandidikan yang menawarkan kualifikasi terdiri dari bermacam-macam jenis dan mempunyai struktur yang agak kompleks, paralel dengan pendidikan vokasional, teknik dan

⁴ Tajab, *Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994), hlm.52

bisnis. Pendidikan vokasional diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri, sedangkan ijazah diberikan oleh Kamar Dagang, Industri atau keuangan, program ini sering disebut “sistem ganda”. Sertifikat atau ijazah ini adalah resmi dan diakui oleh negara. Satu sekolah yaitu Fachgymnasium, secara resmi sekolah ini termasuk sekolah umum pada tingkat menengah keatas. Program kurikulumnya diarahkan pada bidang ekonomi, sosial dan tehnik.

Secara keseluruhan sistem pendidikan vokasional, teknik dan bisnis ini diselenggarakan dengan seperangkat peraturan yang mencakup persyaratan masuk, transisi, dan kualifikasi lulusan.

Pendidikan Orang Dewasa dan pendidikan Nonformal

Pendidikan bagi orang dewasa (Adult Education) di Jerman dikelompokkan dalam tiga kategori umum, vokasional (termasuk teknik dan keuangan), dan politik. Program pendidikan orang dewasa ini didominasi penyelenggaraannya oleh volchochschulen, biasanya didukung oleh masyarakat setempat. Walaupun sekolah ini mungkin terdaftar sebagai organisasi nirlaba. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup yaitu;

1. Bahasa
2. Ekonomi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam
3. Kesehatan
4. Kerajinan tangan
5. Sekolah persamaan
6. Politik dan ilmu-ilmu sosial
7. Pendidikan, psikologi, dan teologi
8. Kesusastraan dan seni

Mata pelajaran yang diberikan pada volkshochschulen dapat dianggap sebagai pendidikan vokasional orang dewasa, maka institusi ini menjadi sangat penting sebagai penyelenggara program itu.

Pendidikan politik bagi orang dewasa diartikan terutama sebagai kegiatan yang erat hubungannya dengan partai politik, dan juga berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh serikat-serikat kerja. Mencapai 10% dari orang-orang yang sesungguhnya memerlukan peningkatan kualifikasi profesional melalui program ini. Dapat dikatakan bahwa sedikit sekali kegiatan ini dalam bentuk formal dengan pengertian diakui oleh pemerintah dengan sertifikat, program pendidikan orang dewasa sebagai sektor keempat dalam sistem pendidikan Jerman bukan tidak beralasan.

Manajemen Pendidikan

Otorita

Konstitusi Federal telah menetapkan wewenang *Lander* atas pendidikan, maka beberapa Lender membuat beberapa ketentuan dalam konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan, dan selurunya melalui proses legislative. Pengaturan itu mencakup penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Dalam negara bagian, tanggung jawab pendidikan terletak pada level kementerian kabinet yang sering disebut Kementerian Kebudayaan. Pada negara-negara bagian yang luas daerahnya. Sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh kementerian negara bagian, tetapi melalui badan administratif regional yang merupakan bagian dari badan eksekutif tanpa pasangan atau counterpart langsung dari pihak legislatif atau DPR. Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infra struktur yang diperlukan dan ada kalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf.

Supervisi atau inspeksi terhadap sekolah merupakan tugas kementerian negara bagian, secara langsung atau tidak. Dengan beberapa pengecualian, gereja-gereja negara bagian tidak lagi melakukan fungsi supervisi terhadap sekolah. Secara resmi ada tiga fungsi supervisi sekolah, fungsi pedagogis, hukum dan servis masyarakat.

Rekonsiliasi mengenai struktur pendidikan di Jerman, Konferensi Menteri-mentri Kebudayaan menetapkan, melalui keputusan bulat, prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku secara nasional serta kesepakatan mengenai masalah-masalah internasional. Komisi Gabungan Perencanaan Pendidikan dan Dukungan Penelitian merumuskan rekomendasi dan mengawasi program-program eksperimen. Dalam Komisi, Pemerintah Federal dan Pemerintahan Negara Bagian memiliki hak suara yang sama. Sesudah perubahan Konstitusi tahun 1969, sejumlah wewenang negara bagian mengenai pendidikan tinggi dialihkan ke pemerintah Federal.

Pendanaan

Dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan sepenuhnya berada di tangan Lender dan masyarakat setempat. Secara umum, seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian, dan infra struktur oleh masyarakat. Hampir semua program pendidikan (termasuk pembebasan uang kuliah pada pendidikan tinggi) bersifat gratis. Pemerintah Federal juga memberikan bantuan kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi, banyak diantaranya yang menerima bantuan dari anggaran pemerintah dengan jumlah yang cukup besar (kira-kira 90% dari biaya operasional sekolah).

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 3,7% (Jerman Barat) dari GNP (*Gross National Product*) dalam tahun 1990, dan ditambah 1,7% untuk penelitian. Investasi swasta untuk penelitian dan pembangunan berjumlah 3,9%, sehingga pengeluaran tahun 1990 mencapai 9,3% dari GNP. Tetapi semenjak 1975 sebagai pertanda berakhirnya perluasan sistem secara menyeluruh. Dalam tahun 1989, unit biaya pendidikan persiswa untuk sekolah-sekolah adalah DM 6,2000 (Us\$3,650) dan DM 17,100 (US\$10,060) permahasiswa pada pendidikan tinggi.

Personalia

Guru-guru *Gymnasien* dan sebagian guru-guru spesialis untuk bidang keuangan yang di didik ditingkat universitas, dengan tekanan utama di bidang keahlian di dibandingkan dengan bidang keguruan. Pada umumnya, pendidikan bidang studi mencakup dua disiplin ilmu yang dapat diambil pada universitas atau fakultas. Untuk beberapa spesialisasi, bidang pendidikan umum dilengkapi dengan mata kuliah khusus seperti bidang membaca bagi calon guru pendidikan dasar atau diagnosis terapan bagi yang bermaksud mengajar pada lembaga pendidikan khusus. dalam jurusan pendidikan, tekanan terberat adalah pada pendekatan sejarah, filosofis, dan orientasi pada praktikum.⁵

Kurikulum

Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen yaitu, *pertama*, tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan "grade" dan jenis sekolah, *kedua*, pedoman kurikulum, *ketiga*, pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.

Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah (sering dinyatakan pada Mukadimah suatu Keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan

⁵ Ngalim Purwanto. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: CV Remaja Karya, 1993), hlm.27

pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh kementerian negara bagian dan mencakup silabus, rekomendasi metode mengajar, dan kadang-kadang juga model rencana pelajaran. Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai di sekolah-sekolah Jerman tanpa mendapat persetujuan dari menteri negara bagian.

Keputusan untuk metode mengajar tertentu sepenuhnya diserahkan kepada guru. Dengan semakin menurunnya rasio murid-guru (dari 30:1 tahun 1960 menjadi 15:1 dalam tahun 1980), makin jelas kecenderungannya bahwa metode mengajar “*teacher-centered*” makin di tinggalkan beralih pada bekerja dengan kelompok kecil murid dalam kerangka pendekatan “*student-centered*”. Semenjak akhir tahun 1980-an, konsep “pengajaran terbuka” atau “*open instruction*” yang menekankan pada “murid belajar atas dorongan sendiri” semakin berkembang dan semakin populer pada sekolah-sekolah pendidikan dasar dan juga pada sebagian sekolah menengah pertama.

Ujian, Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi

Tes formal pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak disekolah. Pengecualian itu hanya untuk keperluan diagnostik yaitu mengidentifikasi jenis-jenis dyslexia (kesulitan belajar membaca dan menulis karena kondisi pada otak). Kemudian seperti telah disebutkan terdahulu, tidak ada kenaikan kelas secara otomatis, tetapi kelas mengulang juga sudah hampir tidak dilaksanakan lagi (hanya 1,5% per kelas di pendidikan dasar, dan kira-kira 4% di sekolah tingkat menengah pada tahun 1990).

Sertifikat dan diploma yang dicapai di universitas dan ujian-ujian negara bagian dan memberi hak kepada pemegangnya untuk memasuki program pendidikan yang lebih tinggi, dan juga mengandung nama-nama profesional, termasuk gelar akademik.

Evaluasi, dan penelitian pendidikan

Tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan. Komponen Jerman dalam Asosiasi Internasional untuk Penelitian Penilaian Pencapaian Pendidikan dalam bidang “Membaca” merupakan survei pertama dalam dua dekade terakhir yang didasarkan pada sampel probabilitas siswa secara nasional. Apabila di dibandingkan dengan negara lain, Jerman belum banyak melakukan penelitian empiris dalam bidang pendidikan.⁶

Reformasi dan Isu-Isu Pendidikan

Masa untuk melakukan reformasi pendidikan yang mendasar di Jerman Barat secara resmi berakhir tahun 1975 dengan dibubarkannya Dewan Pendidikan (*Council of Education*) yang mencoba mengimplementasikan sistem pendidikan yang sama sekali baru. Semenjak itu, pemerintah yang konservatif cenderung mempertahankan struktur tripartit pada pendidikan menengah, sementara kementerian yang beraliran Sosial Demokrat mencoba menerapkan *Gesamtschule* sebagai alternatif, kalau tidak sebagai pengganti, sistem tripartit.

Sesungguhnya, seluruh Jerman akan terus mengalami masalah yang kelihatannya makin meningkat, bukan makin terselesaikan. Masalahnya terutama pada anak-anak yang sudah punya persoalan sebelumnya karena latar belakang sosial yang tidak menguntungkan.⁷

⁶ Arif Rohman. Pendidikan Komparatif; *Menuju ke Arah Perbandingan Antar Negara* (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2010) hlm. 13

⁷ Arif Rohman. Pendidikan Komparatif; *Menuju ke Arah Perbandingan Antar Negara* (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2010) hlm. 14

NO	PERMASALAHAN PENDIDIKAN	PERBANDINGAN		ANALISIS
		JERMAN	INDONESIA	
1	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ~ Untuk membentuk pribadi sosialis ~ Mengembangkan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. ~ Menyajikan layanan yang berkualitas ~ Undang-undang tentang Sekolah khusus dan Universitas ditetapkan tujuan utama pendidikan dengan tekad pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan. 	<p>Mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.</p> <p>Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.</p>	<p>Setiap negara memiliki tujuan pendidikan masing-masing yang bertujuan untuk memperoleh taraf hidup menjadi lebih baik, atau bangsa dapat dikuatkan maju serta dapat diikuti dari kualitas pendidikan yang ada di negara tersebut.</p>
2	Sistem	<p>Sistem pendidikan Jerman Barat adalah desentralisasi sedangkan Jerman Timur adalah sentralisasi.</p>	<p>Sistem pendidikan di Indonesia adalah sentralisasi namun dalam penyelenggaraan sistem dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara desentralisasi.</p>	<p>Kedua negara tersebut memiliki sistem pendidikan yang sama yang dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.</p>
3	Dasar	<p>Jerman Timur dalam pendidikannya lebih condong ke arah pengembangan nilai-nilai sosialis sosialis, sedangkan Jerman Barat beritikad</p>	<p>Indonesia menganut pendidikan dengan falsafah Pancasila.</p>	<p>Kedua negara itu memiliki dasar yang berbeda namun berbeda. Dasar tersebut tidak menjadi penyebab untuk setiap negara dalam</p>

		tidak dan dilabeli Demokrasi yang lebih liberal, yang meniadakan kompetisi individual berkembang secara alamiah.		menyebabkan pendidikan sebagai dasar yang di anggap tidak memuaskan antara pendidikan maka dapat dikatakan salah satu demi penyediaan pendidikan yang semakin lebih baik.
4	Kurikulum	Menteri-undang pendidikan negara bagian menyesuaikan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen yaitu: pertama, tabel yang menyesuaikan berapa jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan "grade" dan jenis sekolah. Kedua, pedoman kurikulum. Ketiga, pedoman asesmen nasional dan internasional buku teks.	Berdasarkan standar nasional disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dengan kebutuhan lingkungan pendidikan nasional.	Kurikulum yang digunakan di Indonesia menurut kami baik karena dalam kurikulum tersebut diterapkan cara penyusunan terdapat perkembangan peserta didik dengan lingkungan belia dan masyarakat pendidikan dalam membentuk karakter dan kemampuan anak didik. Kemudian kurikulum yang digunakan di negara Jerman juga baik, selain tidak menggunakan dasar pendidikan.
5	Proses	Keputusan untuk include berbagai tersebut	1. pendidikan formal, 2. nonformal, dan	Proses pendidikan yang diterapkan di

		<p>seringkali diserahkan kepada guru. Konsep "open instruction" atau "open instruction" yang menekankan pada "murid belajar atas dorongan sendiri".</p>	<p>3. informal.</p>	<p>terutama dalam masalah tak ada salahnya Indonesia dapat menyesuaikan teknik yang digunakan di Jerman agar dapat menyesuaikan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Teknik tersebut tentunya dapat di sesuaikan pada pendidikan di Indonesia baik dalam pendidikan formal dan informal. Tak ada salahnya hal ini dicoba.</p>
6	Evaluasi	<p>Tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur untuk menilai pendidikan. Apabila di bandingkan dengan negara lain, Jerman belum pernah melakukan penelitian empiris dalam bidang pendidikan.</p>	<p>Evaluasi Pasal 58 Evaluasi hasil belajar secara didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara didik secara berkala.</p>	<p>dalam kegiatan Evaluasi pendidikan secara berkala dapat dilakukan lebih baik di bandingkan dengan Negara Jerman.</p>
7	Pembiayaan	<p>Dengan memisahkan pendidikan tinggi, lembaga pendidikan seringkali berada di tangan Lender dan</p>	<p>Sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari APBN, APBD ditanggung bersama antar pusat,</p>	<p>Dalam masalah administrasi pendidikan kota negara ini memiliki peran yang baik dalam</p>

	<p>masyarakat seluruh Secara umum, seluruh biaya sekolah dibebaskan oleh pemerintah negara untuk dan infra struktur, oleh masyarakat</p>	<p>daerah dan masyarakat</p>	<p>biaya pendidikan dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam masalah administrasi pendidikan</p>
--	--	------------------------------	---

“pemberian kesempatan yang sama”. Mencari perimbangan antara kebutuhan untuk integrasi sosial bagi anak-anak cacat dan penyelenggaraan pengajaran yang optimal tetap menjadi fokus pemikiran.

KESIMPULAN

Berdasarkan sejarah, pendidikan di Jerman berdasarkan dua sumber yaitu gereja dan negara. Dalam Republik Federal Jerman pasca perang, sistem sekolah tiga jalur dan universitas dengan sistem ekonomi adalah bentuk yang digunakan. Struktur dan Jenis pendidikan Pada tahun 1992, Lander Jerman Timur sedang melakukan reformasi mendasar, tidak ada gambaran akurat yang dapat diberikan mengenai struktur menyeluruh yang mencakup seluruh Jerman. Akan tetapi, sistem pemberian ijazah yang ada di Jerman barat juga sama dengan yang ada di Jerman

Tahun 1970 sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan, hanya sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan dalam Perang Dunia II. Berbagai keunggulan Jerman di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan Jerman yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia II. Tak aneh bila saat ini Jerman menjadi negara tujuan bagi banyak mahasiswa internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hasbullah. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasbullah. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Arif. 2010. *Pendidikan Komparatif; Menuju ke Arah Perbandingan Antar Negara*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Tajab, 1994 *Perbandingan Pendidikan*, Surabaya: Karya Abdi Tama.
- Ngalim Purwanto. (1993). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: CV Remaja Karya.